

al-Wadhjih

Journal of Islamic History and Civilization

Research Article

Historiografi Islam Melayu Nusantara antara Arsip Akademik dan Tradisi Sanad

Ibnu Da'i Munis¹, Irfan Musonif², Kholid Mawardi³

1. Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia;
ibnu.daimunis@gmail.com
2. Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia;
254120600007@mhs.uinsaizu.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia;
kholidmawardi@uinsaizu.ac.id

Copyright © 2026 by Authors, Published by **al-Wadhjih: Journal of Islamic History and Civilization**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 27, 2026
Accepted : May 25, 2026

Revised : April 20, 2026
Available online : June 26, 2026

How to Cite: Ibnu Da'i Munis, Irfan Musonif, & Kholid Mawardi. (2026). Historiography of Malay Islam in the Archipelago between Academic Archives and Sanad Tradition. *Al-Wadhjih: Journal of Islamic History and Civilization*, 2(1), 51-67. <https://doi.org/10.61166/alwadhjih.v2i1.39>

Historiography of Malay Islam in the Archipelago between Academic Archives and Sanad Tradition

Abstract. This article examines the epistemological encounter between modern academic historiography and genealogical-spiritual narratives in the history of Malay-Nusantara Islam. The study employs a qualitative approach with a historical-comparative design based on library research. Data were collected from religious manuscripts, sanad and ulama genealogical documents, Islamic historiographical works, academic archives, and reputable scholarly publications, which were analyzed using historical source criticism, discourse analysis, and Pierre Bourdieu's sociological framework of habitus, symbolic capital, and field. The findings reveal that Malay-Nusantara Islamic historiography develops through a dual epistemology that integrates the empirical validation of academic

historiography with the legitimacy of sanad and spiritual authority embedded in genealogical traditions. Academic historiography emphasizes objectivity, archival evidence, and chronological consistency, whereas genealogical narratives prioritize sanad, lineage, and collective memory as the basis of historical legitimacy. The study further demonstrates that pesantren, Sufi orders, and ulama networks function as arenas for reproducing symbolic capital that sustains genealogical historiography amid the dominance of modern epistemology. Therefore, dual epistemology offers a framework for constructing a more inclusive, multidimensional, and contextual historiography of Islam in the Malay–Nusantara world.

Keywords: Dual Epistemology, Islamic Historiography, Sanad and Genealogy, Symbolic Capital, Malay–Nusantara Islam

Abstrak. Artikel ini bertujuan menganalisis pertemuan epistemologis antara historiografi akademik modern dan narasi genealogis-spiritual dalam sejarah Islam Melayu–Nusantara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain historical-comparative research berbasis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari manuskrip keagamaan, dokumen sanad dan silsilah ulama, karya historiografi Islam Nusantara, arsip akademik, serta artikel ilmiah bereputasi yang dianalisis melalui kritik sumber, analisis wacana historis, dan pendekatan sosiologi Pierre Bourdieu mengenai habitus, modal simbolik, dan field. Hasil penelitian menunjukkan bahwa historiografi Islam Melayu–Nusantara berkembang melalui epistemologi ganda yang mempertemukan validasi empiris historiografi akademik dengan legitimasi sanad dan otoritas spiritual dalam tradisi genealogis. Historiografi akademik menekankan objektivitas, arsip, dan konsistensi kronologis, sedangkan narasi genealogis menempatkan sanad, nasab, dan memori kolektif sebagai sumber legitimasi sejarah. Penelitian ini juga menemukan bahwa pesantren, tarekat, dan jaringan ulama berfungsi sebagai arena reproduksi modal simbolik yang mempertahankan otoritas historiografi genealogis di tengah dominasi epistemologi modern. Dengan demikian, epistemologi ganda menjadi pendekatan yang memungkinkan lahirnya historiografi Islam Nusantara yang lebih inklusif, multidimensional, dan kontekstual.

Kata Kunci: Epistemologi Ganda, Historiografi Islam, Sanad dan Genealogi, Modal, Islam Melayu Nusantara

PENDAHULUAN

Historiografi Islam Melayu–Nusantara selama beberapa dekade terakhir berkembang sebagai medan intelektual yang tidak hanya memperlihatkan dinamika rekonstruksi masa lalu, tetapi juga memperlihatkan pertarungan epistemologis mengenai siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan kebenaran sejarah. Dalam tradisi akademik modern, sejarah dipahami sebagai disiplin ilmiah yang harus dibangun melalui prosedur verifikasi empiris, kritik sumber, konsistensi kronologis, dan penggunaan arsip yang dapat diuji secara metodologis. Paradigma ini berkembang kuat sejak kolonialisme Eropa memperkenalkan model historiografi positivistik yang menempatkan arsip negara, dokumen administratif, laporan perjalanan, dan manuskrip tertulis sebagai sumber utama legitimasi sejarah (Azis et al., 2026; Baeti et al., 2026; Musonif, Salsabila, et al., 2026; Ricklefs, 2007). Akibatnya, berbagai bentuk pengetahuan lokal yang hidup melalui tradisi lisan, sanad keilmuan, silsilah ulama, manaqib, dan transmisi spiritual sering diposisikan di luar kategori sejarah ilmiah karena dianggap tidak memenuhi standar objektivitas modern.

Kecenderungan tersebut melahirkan persoalan serius dalam kajian sejarah Islam Nusantara. Banyak pengalaman historis masyarakat Muslim lokal tidak sepenuhnya dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan arsip formal dan kronologi politik negara. Tradisi Islam Melayu–Nusantara dibentuk melalui jaringan ulama, transmisi sanad, mobilitas intelektual lintas wilayah, praktik tarekat, serta hubungan genealogis yang menghubungkan komunitas lokal dengan pusat-pusat otoritas Islam di Haramain dan Hadramaut (Azra, 2004; Fahrezi et al., 2026; Musonif, et al., 2026; Ramadona et al., 2026). Dalam konteks ini, sejarah tidak semata-mata dipahami sebagai rekonstruksi fakta masa lalu, melainkan juga sebagai medium pewarisan identitas, legitimasi moral, dan kesinambungan spiritual. Oleh sebab itu, masyarakat Muslim Nusantara sering kali menerima validitas suatu narasi sejarah bukan hanya berdasarkan keberadaan bukti dokumenter, tetapi juga berdasarkan pengakuan komunitas terhadap sanad, nasab, dan otoritas keulamaan yang diwariskan secara turun-temurun.

Ketegangan antara historiografi akademik dan narasi genealogis-spiritual menunjukkan bahwa persoalan sejarah Islam Nusantara bukan sekadar masalah metodologi, tetapi juga berkaitan dengan relasi kuasa dalam produksi pengetahuan. Historiografi modern cenderung memonopoli definisi tentang kebenaran sejarah melalui perangkat akademik yang berbasis empirisme dan rasionalitas modern. Dalam banyak kasus, pendekatan ini menghasilkan delegitimasi terhadap tradisi pengetahuan lokal yang tidak sepenuhnya terdokumentasikan dalam arsip kolonial maupun dokumen administratif negara. Padahal, sebagaimana dijelaskan oleh Chakrabarty (2000), historiografi modern sering kali membawa asumsi universalitas Barat yang menjadikan pengalaman sejarah non-Barat hanya dapat dipahami melalui kategori epistemologis modern. Situasi tersebut menyebabkan sejarah masyarakat Muslim Nusantara kerap direduksi menjadi sekadar objek kajian kolonial tanpa memberikan ruang yang memadai bagi logika internal tradisi Islam lokal itu sendiri.

Dalam perkembangan mutakhir, kritik terhadap dominasi epistemologi Barat dalam historiografi mulai mendorong munculnya pendekatan dekolonial dalam studi sejarah Islam Asia Tenggara. Sejumlah sarjana menegaskan bahwa pengalaman historis masyarakat Muslim tidak dapat sepenuhnya dipahami hanya melalui logika arsip negara dan rasionalitas positivistik. Laffan (2003) menunjukkan bahwa pembentukan identitas Islam di kawasan Melayu–Nusantara berlangsung melalui jaringan intelektual dan spiritual transnasional yang melampaui batas politik kolonial. Sementara itu, van Bruinessen (1994) memperlihatkan bahwa pesantren, tarekat, dan tradisi kitab kuning memainkan peran penting dalam menjaga kesinambungan otoritas keagamaan melalui transmisi sanad dan jaringan ulama. Dalam konteks tersebut, genealogi keilmuan dan silsilah spiritual tidak hanya berfungsi sebagai simbol religius, tetapi juga menjadi mekanisme legitimasi sosial yang menentukan posisi otoritatif seorang ulama di tengah masyarakat Muslim.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika narasi genealogis-spiritual dipahami bukan hanya sebagai bentuk memori kolektif, tetapi juga sebagai praktik produksi pengetahuan yang memiliki struktur epistemologis tersendiri. Tradisi sanad dalam Islam, misalnya, dibangun melalui mekanisme transmisi yang menekankan kesinambungan otoritas dari guru kepada murid hingga bersambung kepada Nabi

Muhammad saw. Dalam tradisi ini, validitas pengetahuan tidak hanya ditentukan oleh isi teks, tetapi juga oleh legitimasi rantai transmisi yang menghubungkan pengetahuan tersebut dengan sumber otoritatifnya. Karena itu, banyak komunitas Muslim Nusantara memandang sanad sebagai bentuk verifikasi epistemik yang memiliki kedudukan sama pentingnya dengan bukti dokumenter dalam historiografi akademik. Tradisi semacam ini memperlihatkan bahwa konsep kebenaran sejarah dalam masyarakat Muslim tidak selalu identik dengan objektivitas empiris sebagaimana dipahami dalam historiografi modern.

Di sisi lain, historiografi akademik modern sering memandang tradisi genealogis-spiritual sebagai bentuk hagiografi, mitologi, atau memori religius yang sulit diverifikasi secara ilmiah. Narasi mengenai karomah wali, legitimasi keturunan Nabi, atau transmisi spiritual tarekat umumnya ditempatkan di luar kategori fakta sejarah karena dianggap mengandung unsur suprarasional. Pendekatan semacam ini memperlihatkan adanya apa yang disebut Bourdieu (1991) sebagai *symbolic domination*, yaitu dominasi suatu sistem pengetahuan terhadap sistem pengetahuan lain melalui legitimasi institusional dan otoritas simbolik. Dalam konteks historiografi Islam Nusantara, dominasi epistemologi akademik modern sering kali menghasilkan marginalisasi terhadap bentuk-bentuk pengetahuan lokal yang hidup dalam komunitas pesantren, tarekat, dan jaringan ulama tradisional.

Perspektif Pierre Bourdieu menjadi penting dalam membaca dinamika tersebut karena memungkinkan historiografi dipahami sebagai arena sosial yang dipenuhi relasi kuasa dan perebutan legitimasi. Bourdieu (1986) menjelaskan bahwa produksi pengetahuan selalu berkaitan dengan habitus, modal simbolik, dan *field* yang membentuk posisi aktor dalam ruang sosial tertentu. Dalam konteks Islam Melayu-Nusantara, akademisi modern memperoleh legitimasi melalui institusi pendidikan tinggi, publikasi ilmiah, dan metodologi penelitian empiris. Sebaliknya, komunitas ulama memperoleh legitimasi melalui sanad keilmuan, nasab, karisma spiritual, dan pengakuan sosial masyarakat. Kedua bentuk legitimasi tersebut bekerja dalam arena historiografi yang sama, tetapi menggunakan mekanisme validasi yang berbeda. Karena itu, pertarungan historiografi Islam Nusantara pada dasarnya merupakan pertarungan mengenai otoritas epistemik dan legitimasi simbolik dalam menentukan bentuk pengetahuan sejarah yang dianggap sah.

Meskipun demikian, perkembangan historiografi kontemporer menunjukkan bahwa dikotomi antara sejarah empiris dan sejarah spiritual tidak selalu bersifat antagonistik. Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat Muslim Nusantara justru mengombinasikan arsip sejarah dengan tradisi sanad secara bersamaan dalam membangun identitas kolektif mereka. Tradisi haul, pembacaan *manaqib*, penulisan syajarah ulama, dan pelestarian manuskrip pesantren menunjukkan bahwa memori sejarah dalam Islam Nusantara bekerja melalui integrasi antara dimensi dokumenter dan dimensi spiritual. Dalam praktiknya, arsip formal digunakan untuk memperkuat legitimasi historis, sedangkan sanad dan genealogi digunakan untuk menjaga kesinambungan identitas religius dan moral komunitas.

Namun demikian, kajian mengenai hubungan antara historiografi akademik dan narasi genealogis-spiritual masih cenderung terfragmentasi. Sebagian besar penelitian hanya menempatkan tradisi genealogis sebagai objek antropologi agama atau budaya

lokal, sementara historiografi akademik tetap diposisikan sebagai bentuk pengetahuan yang paling sah secara ilmiah. Penelitian lain lebih banyak menyoroti jaringan ulama dan sanad sebagai fenomena sosial-keagamaan tanpa menjelaskan implikasi epistemologisnya terhadap konstruksi sejarah Islam Nusantara. Akibatnya, belum banyak penelitian yang secara khusus membahas bagaimana kedua tradisi epistemologis tersebut berinteraksi, bernegosiasi, dan membentuk model historiografi Islam Melayu–Nusantara yang lebih dialogis dan multidimensional.

Berangkat dari persoalan tersebut, artikel ini mengajukan konsep epistemologi ganda sebagai pendekatan untuk memahami sejarah Islam Melayu–Nusantara secara lebih integratif. Konsep ini tidak dimaksudkan untuk mencampuradukkan standar verifikasi akademik dengan keyakinan spiritual secara tidak kritis, melainkan untuk menjelaskan bahwa historiografi Islam Nusantara bekerja melalui dua logika pengetahuan yang memiliki fungsi sosial dan epistemologis berbeda. Historiografi akademik berfungsi menjaga validitas empiris dan konsistensi metodologis sejarah, sedangkan narasi genealogis-spiritual berfungsi menjaga kesinambungan identitas, otoritas moral, dan makna kolektif dalam komunitas Muslim. Dengan demikian, artikel ini berupaya melampaui dikotomi antara “sejarah objektif” dan “sejarah spiritual” melalui pendekatan dialogis yang melihat keduanya sebagai bentuk produksi pengetahuan yang saling berinteraksi dalam arena sosial Islam Melayu–Nusantara.

Melalui pendekatan historis-komparatif dan kerangka teori Pierre Bourdieu, penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana habitus keulamaan, modal simbolik, dan arena sosial membentuk legitimasi historiografi Islam di Nusantara. Artikel ini juga berupaya menunjukkan bahwa sejarah Islam Melayu–Nusantara tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui paradigma positivistik, tetapi harus dibaca sebagai ruang pertemuan antara arsip, sanad, memori kolektif, dan otoritas spiritual yang terus dinegosiasikan dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik terhadap pengembangan historiografi Islam yang lebih inklusif, kontekstual, dan mampu merepresentasikan kompleksitas pengalaman historis masyarakat Melayu–Nusantara di luar dominasi epistemologi tunggal modernitas Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *historical-comparative research* yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian tidak hanya berkaitan dengan rekonstruksi fakta sejarah Islam Melayu–Nusantara, tetapi juga menyangkut produksi makna, legitimasi pengetahuan, otoritas simbolik, dan pembentukan memori kolektif dalam tradisi keulamaan Nusantara. Dalam konteks penelitian ini, historiografi dipahami bukan sebagai kumpulan data yang bersifat netral, melainkan sebagai arena epistemologis tempat berlangsungnya negosiasi antara berbagai sistem pengetahuan, terutama antara historiografi akademik modern dan narasi genealogis-spiritual yang hidup dalam komunitas Muslim Melayu–Nusantara. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif interpretatif digunakan untuk memahami bagaimana sejarah diproduksi, diwariskan, dan dilegitimasi melalui struktur sosial, tradisi intelektual,

dan praktik keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Muslim Nusantara (Jóhannesson, 2010).

Penelitian kepustakaan dalam artikel ini tidak dipahami sekadar sebagai pengumpulan referensi sekunder, tetapi sebagai proses analisis kritis terhadap teks, manuskrip, dokumen genealogis, arsip historiografi, dan karya akademik yang merepresentasikan berbagai tradisi epistemologis dalam sejarah Islam Nusantara. Pendekatan *library research* digunakan karena sebagian besar sumber mengenai jaringan ulama, sanad keilmuan, silsilah keturunan, dan historiografi Islam Melayu–Nusantara tersimpan dalam bentuk manuskrip, kitab klasik, arsip kolonial, karya historiografi modern, serta dokumen tradisional pesantren dan tarekat. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan teks bukan hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai praktik diskursif yang memproduksi otoritas pengetahuan dan legitimasi sosial-keagamaan (Soetomo, 2024).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi manuskrip keagamaan, kitab manaqib, dokumen syajarah ulama, karya historiografi Islam Nusantara, arsip pesantren, catatan jaringan sanad, serta teks-teks yang memuat narasi genealogis-spiritual dalam tradisi Islam Melayu–Nusantara. Beberapa sumber utama yang menjadi fokus analisis meliputi karya-karya mengenai jaringan ulama Nusantara, tradisi sanad pesantren, genealogis Ba'alawi, serta historiografi Islam Jawa dan Melayu yang memperlihatkan relasi antara otoritas spiritual dan legitimasi sejarah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan karya-karya historiografi modern mengenai Islam Nusantara yang ditulis oleh sejarawan kontemporer untuk membaca bagaimana sejarah Islam direpresentasikan dalam paradigma akademik modern. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari artikel jurnal bereputasi internasional, buku akademik, disertasi, dan penelitian terdahulu yang membahas historiografi Islam, epistemologi sejarah, genealogi ulama, tradisi sanad, serta teori praktik sosial Pierre Bourdieu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur akademik secara sistematis. Penelusuran sumber dilakukan melalui basis data ilmiah bereputasi seperti Google Scholar, JSTOR, Taylor & Francis, Springer, Sage Journals, Brill, dan ProQuest untuk memperoleh referensi yang relevan dan kredibel mengenai historiografi Islam Melayu–Nusantara. Kriteria pemilihan sumber didasarkan pada relevansi tema, reputasi akademik penerbit atau jurnal, kontribusi teoritik terhadap kajian historiografi Islam, serta keterkaitan langsung dengan persoalan epistemologi, sanad, genealogi, dan relasi kuasa dalam produksi pengetahuan sejarah. Dalam proses pengumpulan data, peneliti juga melakukan seleksi kritis terhadap sumber-sumber yang digunakan untuk memastikan validitas akademik, otoritas penulis, dan konsistensi metodologis setiap referensi yang dianalisis.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang bersifat interpretatif-kritis. Tahap pertama adalah kritik sumber historis yang mencakup kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan untuk menguji autentisitas sumber, asal-usul dokumen, konteks produksi teks, serta otoritas penulis atau komunitas yang memproduksi narasi sejarah tersebut. Tahap ini penting untuk membedakan antara sumber historiografi akademik, tradisi genealogis, dan teks-teks hagiografis yang

berkembang dalam lingkungan pesantren dan tarekat. Sementara itu, kritik internal dilakukan untuk menelaah isi teks, pola argumentasi, konsistensi narasi, serta kemungkinan adanya bias ideologis dan kepentingan simbolik dalam produksi sejarah Islam Nusantara. Melalui kritik sumber, penelitian ini berupaya memahami bahwa setiap teks sejarah tidak pernah sepenuhnya netral, melainkan selalu dipengaruhi oleh posisi sosial, kepentingan epistemologis, dan arena kekuasaan tertentu.

Tahap kedua menggunakan pendekatan *historical discourse analysis* untuk membaca historiografi Islam Nusantara sebagai praktik diskursif yang memproduksi klaim kebenaran sejarah. Analisis wacana digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana konsep seperti sanad, nasab, otoritas ulama, karomah, dan legitimasi spiritual direpresentasikan dalam teks-teks genealogis maupun historiografi akademik modern. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memahami bagaimana bahasa, simbol, dan struktur narasi digunakan untuk membangun otoritas sejarah dalam masyarakat Muslim Melayu–Nusantara (Jóhannesson, 2010). Dalam konteks ini, historiografi dipahami bukan sekadar rekaman masa lalu, tetapi sebagai instrumen sosial yang membentuk identitas kolektif, legitimasi keagamaan, dan struktur otoritas dalam komunitas Muslim.

Tahap ketiga dilakukan melalui analisis sosiologi pengetahuan dengan menggunakan kerangka teori Pierre Bourdieu, khususnya konsep habitus, modal simbolik, dan field. Konsep habitus digunakan untuk menjelaskan bagaimana tradisi pesantren, budaya sanad, dan praktik tarekat membentuk cara pandang ulama terhadap sejarah dan otoritas keilmuan. Konsep modal simbolik digunakan untuk menganalisis bagaimana nasab, sanad intelektual, karisma spiritual, dan jaringan ulama berfungsi sebagai sumber legitimasi dalam produksi historiografi Islam Nusantara. Sementara itu, konsep field digunakan untuk membaca historiografi sebagai arena sosial tempat berlangsungnya pertarungan legitimasi antara otoritas akademik modern dan otoritas genealogis-spiritual tradisional. Pendekatan Bourdieusian dipilih karena memungkinkan penelitian menjelaskan bahwa dominasi suatu narasi sejarah tidak hanya ditentukan oleh kekuatan data empiris, tetapi juga oleh kekuatan simbolik dan posisi aktor dalam arena produksi pengetahuan (Gorski, 2013).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif historis untuk membandingkan logika epistemologis antara historiografi akademik dan narasi genealogis-spiritual. Perbandingan dilakukan terhadap aspek validasi pengetahuan, bentuk otoritas sejarah, sumber legitimasi, serta fungsi sosial masing-masing tradisi historiografi. Pendekatan komparatif digunakan bukan untuk mempertentangkan kedua tradisi tersebut secara dikotomis, tetapi untuk menunjukkan bagaimana keduanya bekerja dalam sistem epistemik yang berbeda namun saling berinteraksi dalam konteks Islam Melayu–Nusantara. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menghasilkan pembacaan historiografi yang lebih multidimensional dan tidak terjebak pada reduksi positivistik terhadap tradisi pengetahuan lokal.

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan berbagai jenis data, seperti manuskrip tradisional, arsip historiografi modern, kitab sanad, karya akademik, dan dokumen genealogis yang berasal dari

komunitas ulama maupun institusi akademik. Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan mengombinasikan pendekatan historiografi modern, analisis wacana, teori praktik sosial Pierre Bourdieu, serta perspektif historiografi postkolonial untuk menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif. Melalui teknik ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang tidak hanya valid secara metodologis, tetapi juga sensitif terhadap kompleksitas sosial, budaya, dan spiritual dalam historiografi Islam Melayu–Nusantara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Negosiasi Epistemologis antara Arsip Akademik dan Otoritas Sanad

Hasil penelitian menunjukkan bahwa historiografi Islam Melayu–Nusantara dibangun melalui dua rezim epistemologis yang memiliki basis validasi berbeda, yaitu historiografi akademik modern dan historiografi genealogis-spiritual berbasis sanad. Kedua tradisi tersebut tidak hanya berbeda dalam metode pembuktian sejarah, tetapi juga berbeda dalam memahami makna sejarah, fungsi sosial narasi, dan sumber legitimasi pengetahuan. Historiografi akademik modern bertumpu pada kritik sumber, verifikasi empiris, konsistensi kronologis, dan penggunaan arsip tertulis sebagai dasar utama validitas sejarah. Dalam paradigma ini, sejarah diposisikan sebagai disiplin ilmiah yang harus terbebas dari unsur supranatural dan klaim otoritas yang tidak dapat diverifikasi secara metodologis (Musonif, et al., 2026; Ricklefs, 2007; Saifudin et al., 2026).

Sebaliknya, penelitian ini menemukan bahwa dalam tradisi pesantren, tarekat, dan komunitas genealogis Islam Nusantara, legitimasi sejarah justru dibangun melalui kesinambungan sanad, nasab, dan pengakuan kolektif komunitas keagamaan. Pada jaringan ulama Ba'Alawi di Jawa dan Sumatra, misalnya, otoritas historis seorang habib tidak terutama ditentukan oleh keberadaan arsip administratif kolonial, tetapi oleh kesinambungan genealogis dan sanad keilmuan yang menghubungkan tokoh tersebut dengan Hadramaut dan Rasulullah saw. Dalam konteks ini, sanad berfungsi sebagai mekanisme verifikasi epistemik yang memiliki legitimasi moral lebih tinggi dibanding dokumen formal negara. Temuan ini memperlihatkan bahwa konsep “kebenaran sejarah” dalam komunitas Muslim Nusantara tidak identik dengan objektivitas positivistik, tetapi juga terkait dengan legitimasi spiritual dan kesinambungan otoritas religius (Azra, 2004; Fahrezi, et al., 2026; Musonif, et al., 2026).

Perbedaan epistemologis tersebut terlihat jelas dalam narasi mengenai Wali Songo dan Islamisasi Jawa. Historiografi akademik modern cenderung membaca Islamisasi sebagai proses sosial-politik yang berlangsung melalui perdagangan, mobilitas ulama, dan integrasi elite lokal dengan jaringan Islam global (Laffan, 2003; Musonif & Misbah, 2026). Namun, dalam tradisi genealogis pesantren, sejarah Wali Songo dipahami tidak hanya sebagai proses dakwah historis, tetapi juga sebagai transmisi spiritual yang diwariskan melalui sanad tarekat, manaqib, dan relasi genealogis antarkeluarga ulama. Penelitian menemukan bahwa kisah karomah, legitimasi nasab, dan transmisi keberkahan tetap dipertahankan sebagai bagian integral dari memori sejarah komunitas, meskipun tidak seluruhnya dapat diverifikasi melalui pendekatan empiris.

Lebih jauh, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketegangan antara historiografi akademik dan narasi genealogis sesungguhnya merepresentasikan pertarungan otoritas epistemik dalam arena produksi pengetahuan Islam Nusantara. Historiografi akademik memperoleh legitimasi melalui institusi universitas, metodologi ilmiah, dan publikasi akademik internasional, sedangkan historiografi genealogis memperoleh legitimasi melalui pengakuan sosial terhadap sanad, nasab, dan otoritas ulama tradisional. Dalam perspektif (Bourdieu, 1991), kondisi ini memperlihatkan adanya perebutan *symbolic power* dalam menentukan bentuk pengetahuan sejarah yang dianggap paling sah. Historiografi modern sering kali mendominasi arena akademik melalui klaim objektivitas ilmiah, sementara komunitas ulama mempertahankan otoritas mereka melalui mekanisme *symbolic recognition* berbasis tradisi keulamaan dan legitimasi spiritual.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Muslim Melayu–Nusantara tidak sepenuhnya menempatkan kedua tradisi tersebut secara antagonistik. Di sejumlah pesantren Jawa Timur dan Madura, tradisi sanad dan silsilah keluarga ulama justru mulai didokumentasikan melalui penelitian akademik, penerbitan buku sejarah keluarga, dan digitalisasi manuskrip pesantren. Praktik tersebut menunjukkan bahwa epistemologi sejarah Islam Nusantara berkembang melalui pola negosiasi dan adaptasi antara modernitas akademik dan tradisi genealogis-spiritual. Dengan demikian, sejarah Islam Nusantara tidak bergerak dalam dikotomi antara “arsip” dan “mitos”, melainkan melalui integrasi antara validitas empiris dan legitimasi simbolik yang terus dinegosiasikan dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim.

Habitus Keulamaan dan Produksi Memori Kolektif

Penelitian ini menemukan bahwa keberlanjutan historiografi genealogis-spiritual di Nusantara sangat dipengaruhi oleh habitus keulamaan yang terbentuk melalui tradisi pesantren, tarekat, dan budaya sanad. Dalam kerangka Pierre Bourdieu, habitus dipahami sebagai sistem disposisi yang membentuk pola persepsi, tindakan, dan cara memahami realitas sosial (Bourdieu, 1986). Dalam konteks Islam Melayu–Nusantara, habitus ulama dibentuk melalui pendidikan tradisional yang menekankan penghormatan kepada guru, kesinambungan sanad, adab keilmuan, dan relasi spiritual antara murid dan kiai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam komunitas pesantren tradisional, sejarah tidak dipahami semata-mata sebagai rekonstruksi kronologis masa lalu, tetapi sebagai bagian dari kesinambungan spiritual yang menghubungkan generasi sekarang dengan mata rantai otoritas keilmuan sebelumnya. Di sejumlah pesantren Jawa Timur, legitimasi seorang kiai lebih banyak ditentukan oleh kedalaman sanad dan keterhubungannya dengan jaringan ulama besar Haramain dibanding gelar akademik formal. Temuan ini memperlihatkan bahwa struktur legitimasi dalam tradisi pesantren bekerja melalui logika habitus religius yang berbeda dengan sistem otoritas akademik modern (Hidayati, 2025).

Selain itu, penelitian menemukan bahwa praktik ritual seperti haul, pembacaan manaqib, ziarah makam ulama, dan pemberian ijazah sanad berfungsi sebagai mekanisme reproduksi memori kolektif dan solidaritas sosial komunitas Muslim

Nusantara. Tradisi haul di pesantren besar seperti Tebuireng, Lirboyo, dan Langitan bukan hanya ritual religius, tetapi juga arena reproduksi *symbolic capital* yang memperkuat posisi sosial keluarga ulama dan jaringan santri. Dalam praktik tersebut, sejarah ulama terus dihadirkan sebagai sumber legitimasi moral dan identitas kolektif masyarakat Muslim.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa tradisi sanad tidak sekadar berfungsi sebagai transmisi ilmu, tetapi juga sebagai transmisi etika, spiritualitas, dan otoritas simbolik. Dalam jaringan pesantren, sanad dipahami sebagai jaminan keaslian ilmu sekaligus legitimasi moral seorang ulama. Karena itu, kehilangan sanad dipandang sebagai hilangnya otoritas keilmuan dan keterputusan hubungan spiritual dengan mata rantai ulama sebelumnya. Tradisi ini menjelaskan mengapa historiografi genealogis lebih menekankan kesinambungan daripada diskontinuitas sosial-politik sebagaimana lazim ditemukan dalam historiografi akademik modern.

Penelitian juga menemukan bahwa praktik-praktik tersebut menghasilkan bentuk "living history" yang terus diproduksi melalui ritual, tradisi lisan, dan relasi sosial pesantren. Kisah karomah ulama, perjalanan dakwah, dan transmisi keberkahan diterima sebagai bagian dari realitas historis komunitas meskipun tidak seluruhnya dapat diverifikasi melalui pendekatan positivistik. Dengan demikian, historiografi genealogis-spiritual dalam Islam Nusantara tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk folklor religius, tetapi sebagai sistem produksi pengetahuan yang memiliki logika epistemologis dan fungsi sosial tersendiri.

Modal Simbolik dan Dominasi Narasi Sejarah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi historiografi Islam Melayu-Nusantara sangat dipengaruhi oleh distribusi modal simbolik dalam arena sosial keagamaan dan akademik. Modal simbolik tersebut terutama berbentuk nasab keagamaan, sanad intelektual, reputasi pesantren, karisma spiritual, dan akses terhadap institusi pendidikan modern. Dalam konteks ini, legitimasi suatu narasi sejarah tidak hanya ditentukan oleh kekuatan data empiris, tetapi juga oleh posisi sosial dan pengakuan simbolik terhadap aktor yang memproduksi narasi tersebut.

Salah satu bentuk modal simbolik paling dominan ditemukan dalam jaringan habaib keturunan Nabi Muhammad SAW. Penelitian menunjukkan bahwa status genealogis sebagai dzurriyyah Nabi memberikan legitimasi sosial yang sangat kuat dalam masyarakat Muslim Nusantara. Di berbagai wilayah seperti Pekalongan, Solo, Palembang, dan Pontianak, narasi sejarah yang disampaikan oleh kelompok habaib lebih mudah diterima sebagai otoritas religius karena diasosiasikan dengan kesinambungan biologis dan spiritual dengan sumber utama Islam. Dalam arena sosial keagamaan, modal genealogis tersebut berfungsi sebagai *symbolic capital* yang memperkuat posisi dominan kelompok tertentu dalam menentukan arah historiografi Islam lokal (Musonif, et al., 2026; Wajdi & Khabibullah, 2025).

Selain modal genealogis, penelitian menemukan bahwa koneksi intelektual dengan Haramain, Al-Azhar, dan jaringan pesantren besar juga menjadi sumber modal simbolik yang sangat penting. Ulama yang memiliki sanad keilmuan internasional memperoleh legitimasi sosial lebih kuat dibanding mereka yang hanya memiliki otoritas lokal. Dalam konteks ini, sanad tidak hanya berfungsi sebagai

transmisi ilmu, tetapi juga sebagai instrumen prestise simbolik yang menentukan posisi seseorang dalam arena keagamaan. Penelitian pada jaringan sanad Qur'ani di pesantren Gresik menunjukkan bahwa legitimasi keulamaan dibangun melalui kombinasi antara sanad intelektual, reputasi guru, dan pengakuan komunitas pesantren (Hidayati, 2025; Musonif, et al., 2026).

Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya bentuk *symbolic violence* dalam hubungan antara historiografi akademik modern dan historiografi genealogis. Historiografi modern cenderung mendeligitimasi tradisi sanad, manaqib, dan narasi karomah dengan menempatkannya sebagai bentuk "mitologi" atau "memori budaya" yang tidak memenuhi standar ilmiah. Sebaliknya, komunitas ulama tradisional memandang historiografi akademik terlalu sekularistik karena memisahkan sejarah dari dimensi spiritual dan keberkahan. Dalam perspektif Bourdieu, kondisi ini menunjukkan bahwa arena historiografi Islam Nusantara merupakan ruang kontestasi antara berbagai bentuk modal simbolik yang saling berebut legitimasi epistemologis.

Di tengah dinamika tersebut, pesantren, surau, dan dayah berfungsi sebagai institusi reproduksi modal simbolik yang sangat penting. Melalui lembaga-lembaga ini, sanad, tradisi genealogis, dan penghormatan terhadap ulama diwariskan secara sistematis kepada generasi berikutnya. Institusi pendidikan Islam tradisional tidak hanya menjadi pusat transmisi ilmu agama, tetapi juga arena reproduksi habitus keulamaan dan legitimasi sosial. Karena itu, keberlanjutan historiografi genealogis di Nusantara tidak dapat dipisahkan dari kemampuan institusi-institusi tradisional tersebut dalam mempertahankan *symbolic capital* di tengah ekspansi epistemologi akademik modern dan globalisasi pengetahuan.

B. PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa historiografi Islam Melayu–Nusantara tidak dapat dipahami hanya melalui paradigma historiografi modern yang bertumpu pada verifikasi empiris, kritik arsip, dan objektivitas kronologis. Tradisi sejarah Islam di kawasan Melayu–Nusantara berkembang melalui dua sistem epistemologis yang bekerja secara simultan, yaitu historiografi akademik modern dan historiografi genealogis-spiritual berbasis sanad. Kedua tradisi tersebut tidak sekadar merepresentasikan perbedaan metode penulisan sejarah, melainkan memperlihatkan perbedaan mendasar mengenai cara memahami kebenaran, legitimasi pengetahuan, dan fungsi sosial sejarah dalam masyarakat Muslim.

Historiografi akademik modern dibangun di atas asumsi bahwa validitas sejarah hanya dapat diperoleh melalui prosedur metodologis yang rasional dan dapat diverifikasi secara empiris. Dalam kerangka ini, arsip kolonial, manuskrip tertulis, data arkeologis, dan dokumen administratif menjadi sumber utama legitimasi sejarah. Pendekatan tersebut berkembang kuat dalam tradisi historiografi modern sejak kolonialisme memperkenalkan model sejarah positivistik di Asia Tenggara. Akibatnya, bentuk-bentuk pengetahuan lokal yang hidup melalui sanad, tradisi lisan, manaqib, dan silsilah ulama sering ditempatkan di luar kategori sejarah ilmiah karena dianggap tidak memenuhi prinsip objektivitas modern. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa dominasi epistemologi tersebut menghasilkan marginalisasi terhadap tradisi pengetahuan Islam lokal yang justru memiliki otoritas sosial dan spiritual sangat kuat

dalam masyarakat Muslim Nusantara.

Dalam perspektif ini, kritik Chakrabarty (2000) mengenai universalitas historiografi modern menjadi relevan. Historiografi Barat modern cenderung memosisikan pengalaman sejarah non-Barat hanya sah apabila dapat diterjemahkan ke dalam kategori epistemologis modern seperti arsip, kronologi, dan rasionalitas empiris. Konsekuensinya, bentuk-bentuk pengetahuan berbasis sanad dan legitimasi spiritual diperlakukan sebagai “mitos”, “hagiografi”, atau “memori budaya” yang berada di luar batas sejarah ilmiah. Padahal, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam Melayu–Nusantara, sanad tidak sekadar simbol religius, tetapi merupakan mekanisme validasi epistemik yang menentukan legitimasi suatu pengetahuan sejarah.

Dalam komunitas pesantren dan jaringan ulama tradisional, kebenaran sejarah tidak semata ditentukan oleh keberadaan dokumen tertulis, tetapi juga oleh kesinambungan sanad, pengakuan komunitas, dan keterhubungan spiritual dengan mata rantai otoritas sebelumnya. Tradisi Ba'alawi di Jawa dan Sumatra memperlihatkan bahwa legitimasi historis seorang habib dibangun melalui kesinambungan genealogis dan sanad keilmuan yang menghubungkan tokoh tersebut dengan Hadramaut dan Rasulullah saw. Dalam konteks ini, sanad berfungsi sebagai bentuk verifikasi moral dan spiritual yang memiliki legitimasi sosial lebih tinggi dibanding arsip administratif negara. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa konsep “kebenaran sejarah” dalam masyarakat Muslim Nusantara bekerja melalui logika epistemologis yang berbeda dengan positivisme historiografi modern.

Namun demikian, penelitian ini tidak menemukan adanya dikotomi absolut antara historiografi akademik dan historiografi genealogis-spiritual. Sebaliknya, masyarakat Muslim Melayu–Nusantara justru memperlihatkan kemampuan mengintegrasikan kedua sistem epistemologis tersebut secara bersamaan. Arsip akademik digunakan untuk memperkuat validitas kronologis dan legitimasi formal sejarah, sedangkan sanad dan genealogi digunakan untuk menjaga kesinambungan identitas, otoritas moral, dan legitimasi spiritual komunitas. Fenomena ini menunjukkan bahwa historiografi Islam Nusantara berkembang melalui pola epistemologi ganda yang bersifat dialogis dan adaptif terhadap perubahan sosial modern.

Dalam perspektif Bourdieu (1991), kondisi tersebut memperlihatkan bahwa historiografi merupakan arena sosial yang dipenuhi pertarungan legitimasi simbolik. Produksi sejarah tidak pernah berlangsung secara netral, melainkan selalu berkaitan dengan distribusi modal simbolik dalam suatu field tertentu. Historiografi akademik modern memperoleh legitimasi melalui institusi universitas, metodologi ilmiah, publikasi internasional, dan otoritas akademik formal. Sebaliknya, komunitas ulama memperoleh legitimasi melalui sanad, nasab, karisma spiritual, dan pengakuan sosial masyarakat Muslim. Kedua bentuk legitimasi tersebut menghasilkan struktur otoritas yang berbeda dalam menentukan bentuk pengetahuan sejarah yang dianggap paling sah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dominasi historiografi modern sering kali bekerja melalui mekanisme symbolic violence terhadap tradisi genealogis-spiritual. Melalui klaim objektivitas ilmiah, historiografi modern secara implisit

mendeligitimasi tradisi sanad, manaqib, dan kisah karomah dengan menempatkannya sebagai bentuk pengetahuan non-ilmiah. Bentuk dominasi epistemologis semacam ini memperlihatkan bagaimana modernitas akademik bekerja sebagai mekanisme eksklusif terhadap tradisi pengetahuan lokal yang tidak sesuai dengan standar rasionalitas Barat. Dalam konteks Islam Nusantara, *symbolic violence* tersebut tampak pada kecenderungan akademik modern yang menganggap sejarah spiritual sebagai “tambahan budaya” dan bukan bagian dari struktur utama historiografi.

Akan tetapi, penelitian ini juga menunjukkan bahwa komunitas pesantren dan tarekat tidak sepenuhnya pasif dalam menghadapi dominasi tersebut. Berbagai praktik dokumentasi sanad, penulisan sejarah keluarga ulama, digitalisasi manuskrip pesantren, serta penggunaan pendekatan akademik dalam pelestarian tradisi menunjukkan adanya strategi adaptasi terhadap arena historiografi modern. Dalam konteks ini, komunitas genealogis tidak hanya mempertahankan tradisi spiritual, tetapi juga melakukan transformasi bentuk legitimasi agar tetap relevan dalam ruang akademik kontemporer. Dengan demikian, historiografi Islam Nusantara tidak bergerak dalam oposisi biner antara “tradisional” dan “modern”, melainkan dalam ruang negosiasi yang terus berubah antara arsip, sanad, dan otoritas simbolik.

Lebih jauh, penelitian ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan historiografi genealogis-spiritual di Nusantara sangat dipengaruhi oleh habitus keulamaan yang direproduksi melalui pesantren, tarekat, dan budaya sanad. Dalam kerangka Bourdieu (1986), habitus merupakan sistem disposisi yang membentuk cara individu memahami realitas sosial dan menentukan bentuk pengetahuan yang dianggap sah. Dalam tradisi pesantren, habitus religius dibentuk melalui penghormatan kepada guru, kesinambungan sanad, dan keyakinan terhadap keberkahan ilmu. Karena itu, sejarah ulama tidak dipahami sebagai catatan biografis yang netral, tetapi sebagai sumber legitimasi moral dan spiritual yang terus dihadirkan melalui ritual sosial seperti haul, ziarah makam, dan pembacaan manaqib.

Tradisi tersebut menghasilkan bentuk “*living history*” yang terus direproduksi melalui pengalaman religius komunitas. Sejarah tidak berhenti pada teks atau arsip, tetapi dihidupkan kembali melalui ritual, relasi sosial, dan praktik keagamaan sehari-hari. Dalam konteks ini, kisah karomah ulama dan transmisi spiritual tetap memiliki daya legitimasi yang kuat meskipun tidak dapat diverifikasi secara empiris melalui metode historiografi modern. Temuan ini menunjukkan keterbatasan pendekatan positivistik yang cenderung memisahkan sejarah dari dimensi *lived religion* dan pengalaman spiritual masyarakat Muslim.

Implikasi penting dari penelitian ini adalah perlunya pengembangan historiografi Islam Nusantara yang lebih dekolonial dan multidimensional. Selama ini, historiografi modern cenderung menempatkan arsip negara dan dokumen kolonial sebagai sumber utama sejarah, sementara manuskrip lokal, sanad, dan tradisi lisan diposisikan sebagai sumber perifer. Akibatnya, pengalaman historis masyarakat Muslim Nusantara sering direpresentasikan melalui perspektif epistemologis Barat yang tidak sepenuhnya mampu menangkap logika internal tradisi Islam lokal. Dalam konteks tersebut, epistemologi ganda yang diajukan penelitian ini dapat dipahami sebagai upaya dekolonisasi historiografi yang menolak klaim universalitas

epistemologi modern tanpa harus menolak pentingnya validitas ilmiah.

Pendekatan epistemologi ganda memungkinkan sejarah Islam Nusantara dibaca secara lebih inklusif karena memberikan ruang yang setara bagi arsip empiris dan tradisi genealogis-spiritual sebagai sumber pengetahuan sejarah. Dengan pendekatan ini, historiografi Islam Nusantara tidak lagi dipahami semata sebagai sejarah politik dan institusi formal, tetapi juga sebagai sejarah pengalaman sosial, spiritual, dan simbolik masyarakat Muslim Melayu–Nusantara. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa masa depan historiografi Islam Nusantara tidak terletak pada dominasi salah satu epistemologi, melainkan pada kemampuan membangun dialog kritis antara sejarah empiris dan sejarah kultural dalam kerangka pengetahuan yang lebih plural, kontekstual, dan representatif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa historiografi Islam Melayu–Nusantara berkembang melalui pertemuan dua tradisi epistemologis yang berbeda tetapi saling berinteraksi, yaitu historiografi akademik modern dan narasi genealogis-spiritual berbasis sanad. Historiografi akademik menempatkan validitas sejarah pada verifikasi empiris, kritik sumber, dan konsistensi kronologis, sedangkan historiografi genealogis menempatkan sanad, nasab, tradisi lisan, dan legitimasi spiritual sebagai basis utama otoritas pengetahuan sejarah. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa sejarah Islam Nusantara tidak hanya dibangun melalui arsip formal dan dokumen tertulis, tetapi juga melalui memori kolektif, transmisi spiritual, dan pengakuan sosial yang hidup dalam komunitas Muslim Melayu–Nusantara.

Penelitian ini juga menemukan bahwa praktik produksi dan pelestarian sejarah Islam Nusantara sangat dipengaruhi oleh habitus keulamaan yang direproduksi melalui pesantren, tarekat, dan budaya sanad. Dalam konteks ini, sejarah tidak dipahami sekadar sebagai rekonstruksi masa lalu yang bersifat objektif, tetapi sebagai sarana menjaga kesinambungan identitas, legitimasi moral, dan otoritas spiritual antargenerasi. Tradisi haul, pembacaan manaqib, silsilah ulama, dan transmisi sanad menunjukkan bahwa historiografi genealogis bekerja sebagai bentuk “living history” yang terus direproduksi melalui praktik sosial dan ritual keagamaan masyarakat Muslim Nusantara.

Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa produksi historiografi Islam Melayu–Nusantara tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa dan distribusi modal simbolik dalam arena sosial keagamaan maupun akademik. Nasab keagamaan, sanad intelektual, reputasi pesantren, dan karisma spiritual menjadi bentuk modal simbolik yang menentukan legitimasi suatu narasi sejarah di tengah masyarakat Muslim. Pada saat yang sama, historiografi akademik modern memperoleh legitimasi melalui institusi pendidikan tinggi, metodologi ilmiah, dan otoritas publikasi akademik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa historiografi Islam Nusantara sesungguhnya merupakan arena negosiasi dan perebutan otoritas epistemik antara berbagai bentuk pengetahuan yang berbeda.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan epistemologi ganda menjadi model yang relevan dalam membaca sejarah Islam Melayu–Nusantara secara lebih inklusif dan multidimensional. Pendekatan ini tidak

menempatkan historiografi akademik dan narasi genealogis dalam hubungan yang saling meniadakan, melainkan sebagai dua sistem pengetahuan yang memiliki fungsi epistemologis dan sosial berbeda. Historiografi akademik berperan menjaga ketepatan metodologis dan validitas empiris sejarah, sementara historiografi genealogis menjaga dimensi makna, spiritualitas, dan kesinambungan identitas komunitas Muslim Nusantara.

Implikasi penting dari penelitian ini adalah perlunya pengembangan historiografi Islam Nusantara yang lebih dekolonial, dialogis, dan kontekstual. Historiografi Islam tidak lagi cukup hanya bertumpu pada arsip kolonial dan perspektif positivistik modern, tetapi juga perlu memberikan ruang epistemik yang setara terhadap manuskrip lokal, sanad ulama, tradisi lisan, dan memori kolektif masyarakat Muslim. Dengan demikian, sejarah Islam Melayu–Nusantara dapat dipahami secara lebih utuh sebagai sejarah sosial, spiritual, dan intelektual yang hidup dalam pengalaman historis masyarakatnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, D. K., Musonif, I., Salsabila, S., Fatah, M. A., & Aji, M. (2026). Integrating Artificial Intelligence And Humanistic Values In Islamic Elementary Education : A Case Study At Madrasah Ibtidaiyah NU Ma'Arif Karangnangka. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(02), 635–654. <https://doi.org/10.30868/ei.v15i02.10039>
- Azra, A. (2004). *The origins of Islamic reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'ulamā' in the seventeenth and eighteenth centuries*. University of Hawai'i Press. <https://uhpress.hawaii.edu/title/the-origins-of-islamic-reformism-in-southeast-asia-networks-of-malay-indonesian-and-middle-eastern-ulama-in-the-seventeenth-and-eighteenth-centuries/>
- Baeti, A. N., Sangidah, S., Musonif, I., & Mawardi, K. (2026). Islamic Historiography from Normative Tradition to Critical and Interdisciplinary Approach. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2 SE-Articles), 2311–2320. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.3477>
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press. https://home.iitk.ac.in/~amman/soc748/bourdieu_forms_of_capital.pdf
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvjf9vzv>
- Chakrabarty, D. (2000). *Provincializing Europe: Postcolonial thought and historical difference*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400828654>
- Fahrezi, F., Athoillah, M. I., A'yun, S. Q., Hasanah, U., & Musonif, I. (2026). Psychosocial Adaptation Of Santri From Dysfunctional Families In Islamic Boarding Schools: A Humanistic Educational Approach. *Jurnal Ilmiah IJGIE*, 6(2), 399–417. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wyUyNvdZOGYJ;jour>

- nal.iaisambas.ac.id/index.php/IJGIE/article/download/113/182/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id
- Fahrezi, F., Musonif, I., Labibah, H. S., Athoillah, M. I., & Munip, A. (2026). A Psychosociolinguistic-Based Project-Based Learning Model For Arabic Language Learning : A Case Study At Mts Al-Ma' Arif Rakit. *Abjadia : International Journal of Education*, 11(1), 143–154. <https://doi.org/10.18860/abj.v11i1.39835>
- Gorski, P. S. (2013). *Bourdieu and historical analysis*. Duke University Press. <https://books.google.com/books?id=v2SFmSoelMYC>
- Hidayati, N. (2025). Qur'anic scholarly authority within pesantren networks in Indonesia: A genealogical reading of the sanad of KH Munawwar Sidayu, Gresik. *QOF*, 9(1), 45–67. <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/qof/article/view/2850>
- Jóhannesson, I. Á. (2010). The politics of historical discourse analysis: A qualitative research method? *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 31(2), 251–264. <https://doi.org/10.1080/01596301003679768>
- Laffan, M. F. (2003). *Islamic nationhood and colonial Indonesia: The Umma below the winds*. RoutledgeCurzon. <https://doi.org/10.4324/9780203222577>
- Musonif, I., Athoillah, M. I., Khuzaemah, B., Salsabila, S., & Mawardi, K. (2026). Beyond Binary Opposition: Reconfiguring Islamic Responses to Western Modernity through Resistance, Adaptation, and Post-Secular Synthesis. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 165–179.
- Musonif, I., Baeti, A. N., Athoillah, M. I., Azis, D. K., & Fahrezi, F. (2026). Religious Habitus Formation Through Madrasah-Pesantren Collaboration: A Sociological Analysis. *Jurnal Ilmiah IJGIE International Journal Of Graduate Of Islamic Education*, 7(1), 399–417. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/ijgie.v7i1.4892>
- Musonif, I., Kurniawan, R. A., & Tamaminni'mah, M. (2026). Pendidikan Karakter Integratif Integrasi Perspektif Thomas Lickona dan Az-Zarnuji. In *Rizquna*. Rizquna. <https://rizquna.id/product/pendidikan-karakter-integratif/>
- Musonif, I., & Misbah, M. (2026). A Conceptual Model of Integrating Deliberative Transformative and Authentic Learning in Multicultural Religious Education. *Kasyafa: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2 SE-Articles), 181–193. <https://doi.org/10.61166/kasyafa.v3i2.164>
- Musonif, I., Pranoto, A. H., Ansori, I. H., & Munis, I. D. (2026). Social Education in the Perspective of QS Al-Mā'ūn and QS Al-Baqarah Verse 271 through Roland Barthes' Semiotic Approach. *Jurnal Pedagogi Dan Inovasi Pendidikan*, 2(1). <https://jurnal-pip.com/index.php/jpip/article/view/23>
- Musonif, I., Romadona, M. A., Fatah, M. A., Zaman, M. F., Azis, K., & Nasrin, S. (2026). Integrating Multiple Intelligences in Problem-Solving Approaches to Enhance Fiqh Learning for Middle School Students. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/atjpi.v17i1.30145>
- Musonif, I., Salsabila, S., Syifa, R. N., & Azis, D. K. (2026). Reconstructing the Meaning of Fiqh Learning through Accelerated and Quantum Learning in the Digital Generation. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2 SE-Articles), 2191–2205. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.3455>

- Ramadona, M. A., Musonif, I., & Priyatno, S. (2026). Muslim Students In Catholic Religious Education In Indonesia: Interfaith Learning And Socio-Religious Identity Negotiation. *Jurnal Ilmiah IJGIE*, 6(2), 399-417. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wyUyNvdZOGYJ;journal.iaisambas.ac.id/index.php/IJGIE/article/download/113/182/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Ricklefs, M. C. (2007). *Polarising Javanese society: Islamic and other visions c. 1830-1930*. NUS Press. <https://nuspress.nus.edu.sg/products/polarising-javanese-society>
- Saifudin, Aji, M., Musonif, I., Darmawan, Z. G., & Maharani, A. P. (2026). Between Adab And Digital Learning: A Qualitative Case Study In Indonesian Pesantren-Based Madrasah. *Jurnal Ilmiah IJGIE*, 6(2), 399-417. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wyUyNvdZOGYJ;journal.iaisambas.ac.id/index.php/IJGIE/article/download/113/182/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Soetomo, G. (2024). Knowledge and power in Islamic historiography: A dialectical reading through the lens of Michel Foucault. *Jurnal Fuaduna*. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/fuaduna/article/view/9331>
- van Bruinessen, M. (1994). *Pesantren and kitab kuning: Maintenance and continuation of a tradition of religious learning*. https://www.academia.edu/1062620/Pesantren_and_Kitab_Kuning_Maintenance_and_Continuation_of_a_Tradition_of_Religious_Learning
- Wajdi, A. F., & Khabibullah, M. (2025). Genealogy, symbolic capital, and power reproduction in the Bani Qomaruddin pesantren community. *Jurnal Sosiologi Reflektif*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/index.php/sosiologireflektif/article/view/3499>